

Hasil Penelitian

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2009 s/d 2016

(EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF NORTH SUMATRA PROVINCE PERIOD OF 2009 TO 2016)

Porman Juanda Marpomari Mahulae

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan
e-mail: pormanjuanda@gmail.com

Diterima: 21 Juni 2018; Direvisi: 27 Agustus 2018; Disetujui: 10 September 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 s/d 2016, serta melakukan evaluasi dengan mengkaji dampak atau pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap variabel-variabel ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus rasio keuangan dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian. Berdasarkan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 s/d 2016 diketahui bahwa: 1) Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada kriteria tinggi dengan nilai rasio kemandirian rata-rata sebesar 157.06%; 2) Rasio efektifitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada kriteria cukup efektif dengan nilai rasio efektifitas rata-rata sebesar 95.41%; 3) Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada kriteria cukup efisien dengan nilai rasio efisiensi rata-rata sebesar 89.11%; 4) Berdasarkan perhitungan Rasio keserasian antara belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal) periode tahun 2009 sampai dengan 2016, terlihat ketimpangan yang jauh antara nilai belanja operasi terhadap belanja modal. Pada periode tersebut rata-rata komposisi belanja operasi dari total nilai belanja adalah 81.25%, sedangkan belanja modal hanya 18.72%; dan, 5) Secara kumulatif rasio pertumbuhan keuangan daerah provinsi Sumatera Utara tidak menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Belum mencerminkan tujuan yang pasti. Nilai rasio pertumbuhan TPD, PAD dan belanja modal yang seharusnya tumbuh stabil ke arah yang meningkat, untuk menggambarkan kinerja yang baik dari Pemerintah daerah di dalam usaha mengumpulkan sumberdaya keuangan untuk membiayai belanja daerah, belum menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Dari perhitungan analisis regresi, diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan 2016 belum berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: evaluasi, keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

ABSTRACT

This study aims to describe the financial performance of the region of North Sumatra Province period 2007 to 2016, and to evaluate by assessing the impact or influence of financial performance on macroeconomic variables and community welfare. In general, this research use quantitative approach. In this study researchers use quantitative descriptive method using financial ratio formulas and multiple linear regression to conduct path analysis of research variables. Based on the calculation of regional financial ratios to the North Sumatra Provincial Government Budget Realization Report for the period of 2009 to 2016 it is known that: 1) The financial independence ratio of North Sumatra Provincial Government is in high criteria with an average self-reliance ratio of 157.06%; 2) The effectiveness ratio of regional finance of North Sumatra Provincial Government is on the criteria is quite effective with the value of the average effectiveness ratio of 95.41%; 3) The financial efficiency ratio of North Sumatra Provincial Government is on the criteria is quite efficient with an average efficiency ratio value of 89.11%; 4) Based on the calculation of the Ratio of harmony between routine expenditure (operation) and

development expenditure (capital) for the period of 2009 to 2016, there is a considerable disparity between the value of operating expenditure to capital expenditure. In that period, the average composition of operating expenditure from total expenditure was 81.25%, while capital expenditure was only 18.72%; and, 5) Cumulatively, the financial growth ratio of North Sumatera province does not show stable growth. It does not reflect a definite purpose. The growth ratio of TPD, PAD and capital expenditures that should grow steadily towards an upward trend, to illustrate the good performance of local government in the effort to collect financial resources to finance regional expenditure, has not shown stable growth. From the calculation of regression model analysis, it is known that all independent variables have no significantly influenced to economic growth, unemployment rate, and poverty level variable.

Keywords: *evaluation, regional finance, North Sumatera Provincial Government*

PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi serta merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas suatu pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi (Machmud et al, 2014). Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel (Batafor, 2011); (Halim, 2007) dan (Budiarto, 2007).

Astuti (2015) dan (Julitawati et al, 2012) menyatakan APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Evaluasi Keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 s/d 2016 ini adalah sebuah evaluasi dan analisis yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan dalam bentuk Pendapatan dan Belanja pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode tersebut. Di dalam pelaksanaannya, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, serta melakukan evaluasi dengan mengkaji dampak atau pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap variabel-variabel ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi bagian dari tujuan akhir pengelolaan keuangan tersebut.

Hal ini menjadi sangat penting untuk diketahui, bila melihat laporan Kajian Ekonomi Regional Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia setiap triwulan tahun anggaran sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, yang mengindikasikan bahwa perekonomian Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja ekonomi dari sisi eksternal. Sedangkan dengan selalu tertahannya kinerja konsumsi dan investasi pemerintah daerah, menahan kinerja perekonomian dari sisi domestik. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan APBD selama ini belum berdampak positif terhadap perekonomian Sumatera Utara, dan belum dapat berbuat banyak didalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif (menggunakan rumus-rumus rasio keuangan) dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian. Data yang menjadi sampel penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Pengukuran Variabel Penelitian

a. Rasio Kemandirian merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah pusat (pendapatan transfer). Formulanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat disajikan pada Tabel 1.

b. Rasio efektifitas, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Formulanya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria rasio kemandirian keuangan daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Mahmudi, 2010

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan. Menurut (Mahmudi, 2010) kriteria efektifitas keuangan daerah ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Kriteria efektifitas keuangan daerah

Persentase efektifitas keuangan (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup efektif
75 - 89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

c. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{anggaran belanja daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Mahmudi, 2010).

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Penilaian Kinerja Keuangan

Persentase efisiensi kinerja keuangan (%)	Kriteria
≤ 60	Sangat Efisien
>60 - 80	Efisien
>80 - 90	Cukup Efisien
>90 - 100	Kurang Efisien
<100	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2010

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Total belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

f. Pertumbuhan ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

g. Pengangguran.

Menurut BPS, pengangguran adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Secara sederhana tingkat pengangguran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

h. Kemiskinan.

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs*) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan *Headcount Index*.

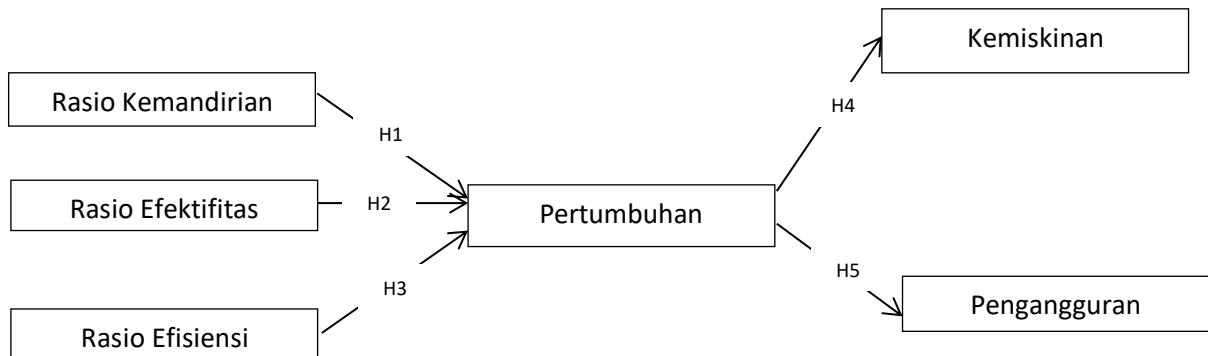
Kerangka Konseptual Penelitian. Secara skematis desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan dan jawaban yang diharapkan serta model pengujiannya dapat digambarkan seperti yang disajikan pada gambar 1. Penentuan hipotesis untuk masing-masing hubungan di ditentukan dari hasil studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu seperti (Astuti 2015); (Syamsudin et al. 2015), (Ani & Dwirandra 2014) dan (Suryaningsih et al. 2015), sehingga hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H2 : Kinerja keuangan berupa rasio efektifitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

- H3 : Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
H4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran

- H5 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Model Pengujian :

- a. Model pengujian pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (model pertama) dapat dirumuskan :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y1 : Pertumbuhan ekonomi (%)
A : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi
X1 : variabel rasio kemandirian (%)
X2 : variabel rasio efektifitas (%)
X3 : variabel rasio efisiensi (%)
E : Error

- b. Model pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran (model kedua) dapat dirumuskan:

$$Y_2 = \alpha + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y2 : Pengangguran (Jiwa)
A : Konstanta
 β_4 : Koefisien regresi
X4 : variabel pertumbuhan ekonomi (%)
E : Error

- c. Model pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (model ketiga) dapat dirumuskan:

$$Y_3 = \alpha + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- Ya : Kemiskinan
A : Konstanta
 β_5 : Koefisien regresi
X5 : variabel pertumbuhan ekonomi
E : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2009 sampai dengan 2016 rata-rata 157.06%, yang mengelompokkan kemampuan keuangan ini dalam kelompok kemampuan yang tinggi. Dari delapan tahun periode tahun anggaran yang dihitung, terlihat rasio kemandirian keuangan yang berada di bawah nilai 100% hanya pada tahun 2016 dengan nilai 94.22%.

Bila melihat data realisasi anggaran pada tahun itu, pendapatan daerah dari kelompok transfer memang mendominasi pendapatan daerah. Pada tahun 2016 Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sejumlah Rp. 4,954,833,100,869.00 dari target Rp. 4,691,493,452,883.00 (realisasi 105.61%), pendapatan transfer sejumlah Rp. 5,258,940,079,069.00 dari rencana target sebesar Rp. 5,142,128,437,780.00 (realisasi

102.27%). Realisasi pendapatan ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang didorong terutama oleh peningkatan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi dana bantuan operasional sekolah (BOS), sebagai dampak beralihnya tanggung jawab pengelolaan Sekolah Tingkat Menengah (SMA dan SMK) yang semula merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Provinsi sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan nilai rata-rata rasio yang digolongkan tinggi, maka pola hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat digolongkan dalam pola hubungan yang delegatif. Artinya pada pola tingkatan ini seharusnya pemerintah pusat telah jauh mengurangi atau bahkan telah meniadakan

campur tangannya dalam mengurus otonominya.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016. Melihat hasil perhitungan Rasio efektifitas keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 seperti yang terlihat pada tabel 5, diketahui bahwa rasio efektifitas pada periode waktu tersebut disimpulkan cukup efektif dengan nilai rata-rata 95.41%.

Berdasarkan kriteria efektifitas, rasio efektifitas yang berada pada kriteria tidak efektif adalah pada tahun 2013, kurang efektif pada tahun 2014, cukup efektif pada tahun 2009 dan tahun 2012. Sedangkan yang lainnya (tahun 2010, 2011, 2015 dan 2016) berkriteria sangat efektif.

Tabel 4. Rasio kemandirian Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s/d 2016

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan keuangan
2009	172.30	Tinggi
2010	204.71	Tinggi
2011	260.46	Tinggi
2012	129.66	Tinggi
2013	125.81	Tinggi
2014	132.98	Tinggi
2015	136.31	Tinggi
2016	94.22	Tinggi
Rata-rata	157.06	Tinggi

Tabel 5. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016.

Tahun	Rasio efektifitas (%)	Kriteria
2009	95.63	Cukup efektif
2010	100.55	Sangat efektif
2011	103.04	sangat efektif
2012	92.65	Cukup efektif
2013	74.04	Tidak efektif
2014	86.13	Kurang efektif
2015	105.63	sangat efektif
2016	105.61	sangat efektif
rata-rata	95.41	Cukup efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016.

Hasil perhitungan dan kriteria rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa perbandingan antara realisasi belanja terhadap anggaran yang direncanakan berkriteria efisien hanya pada tahun anggaran 2013, dimana bila melihat data dari LRA pada tahun anggaran tersebut realisasi belanja daerah adalah senilai 6,738.35 milyar dari 8,502.72 milyar yang dianggarkan.

Berdasarkan jenis belanja dari kelompok belanja operasi, pada tahun 2013 terlihat bahwa ada 2 jenis belanja yang memiliki realisasi yang jauh dari nilai yang dianggarkan. Yaitu Belanja Bantuan Sosial (57.49%); dan Belanja Bantuan Keuangan (63.20%). Sedangkan pada kelompok belanja Modal, jenis belanja yang memiliki realisasi jauh dari yang dianggarkan adalah belanja modal tanah (66.11%).

Pada tahun anggaran 2013 tersebut juga tercatat prestasi, dimana belanja pegawai yang merupakan unsur dari belanja operasi terealisasi sebesar 85.22%, yang berarti bahwa di dalam pelaksanaan program kegiatan untuk menghasilkan output yang direncanakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu menghemat sekitar Rp. 189,357,441,162.00 dalam pembiayaan kepegawaiannya. Dari 8 tahun anggaran yang dianalisa pada penelitian ini, tercatat bahwa realisasi pembiayaan untuk belanja pegawai dari yang direncanakan, tahun 2013 adalah tahun yang memiliki rasio terendah.

Rasio Keserasian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016. Berdasarkan perhitungan Rasio keserasian antara belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal) periode tahun 2009 sampai dengan 2016 berdasarkan LRA

Provinsi Sumatera utara (lihat tabel 7), terlihat ketimpangan yang jauh antara nilai belanja operasi terhadap belanja modal.

Pada periode tersebut rata-rata komposisi belanja operasi dari total nilai belanja adalah 81.25%, sedangkan belanja modal hanya 18.72%. Kondisi ini masih sangat jauh dari yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan hingga 30 persen untuk meningkatkan dampak kebijakan keuangan Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah (<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>).

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 (lihat gambar 2), terlihat bahwa kondisi pertumbuhan yang berkriteria positif ada pada tahun anggaran 2014. Dimana TPD, PAD dan belanja modal tumbuh positif dari tahun sebelumnya, yang diikuti pertumbuhan belanja operasi yang negatif. Untuk pertumbuhan yang paling buruk terjadi pada tahun 2012, dimana belanja operasi tumbuh sangat signifikan dari tahun anggaran sebelumnya, yang diikuti pertumbuhan belanja modal tumbuh negatif dibanding tahun 2011.

Secara kumulatif rasio pertumbuhan keuangan daerah provinsi Sumatera Utara tidak menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Belum mencerminkan tujuan yang pasti. Nilai rasio pertumbuhan TPD dan PAD yang seharusnya tumbuh stabil ke arah yang meningkat, untuk menggambarkan kinerja yang baik dari Pemerintah daerah di dalam usaha mengumpulkan sumberdaya keuangan untuk membiayai belanja daerah, belum menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Tabel. 6. Perhitungan Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2009 s/d 2016

TA	Belanja (milyar)		Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
	Anggaran	Realisasi		
2016	7405.416	6701.775	90.50	Kurang efisien
2015	6112.112	5628.339	92.09	Kurang efisien
2014	6993.222	6115.748	87.45	Cukup efisien
2013	8502.718	6738.347	79.25	Efisien
2012	7590.909	7082.764	93.31	Kurang efisien
2011	4358.122	3810.443	87.43	Cukup efisien
2010	3486.349	3056.931	87.68	Cukup efisien

2009	3129.315	2788.511	89.11	Cukup efisien
------	----------	----------	-------	---------------

Tabel 7. Perhitungan rasio keserasian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan 2016

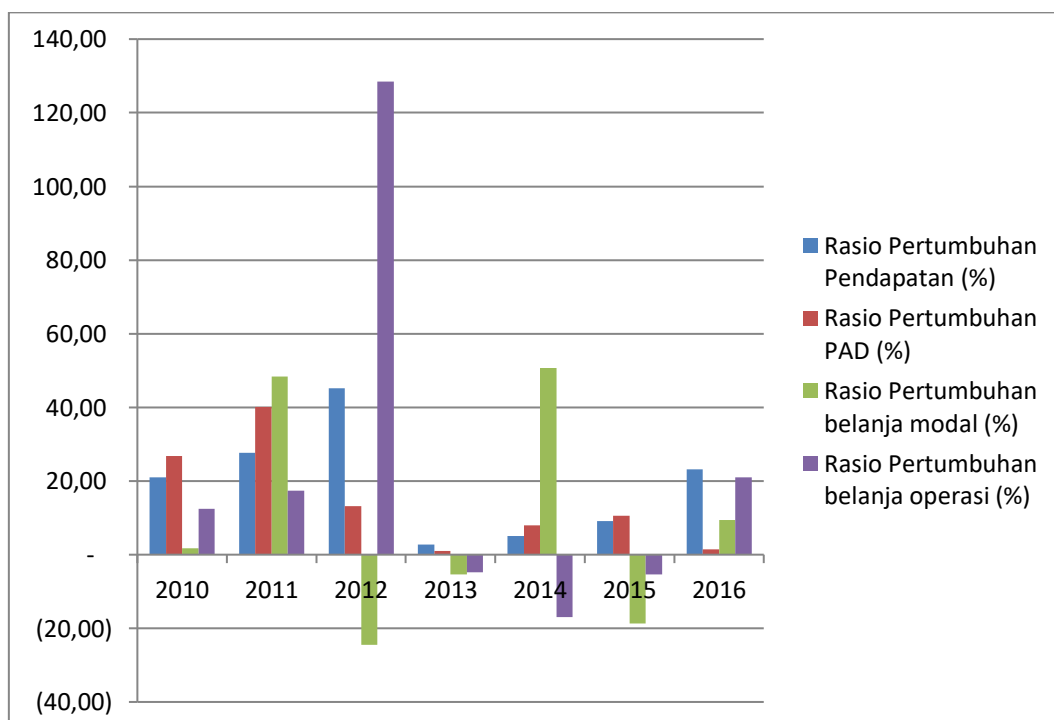
Tahun	Rasio belanja operasi (%)	Rasio belanja modal (%)
2009	74.65	25.26
2010	76.52	23.45
2011	72.09	27.90
2012	88.62	11.35
2013	88.70	11.29
2014	81.19	18.74
2015	83.44	16.56
2016	84.75	15.22
rata-rata	81.25	18.72

PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang murni dari hasil penggalan potensi-potensi keuangan daerah malah tumbuh semakin negatif pada tahun 2011 sampai tahun 2013, dan yang terakhir pada tahun 2016. Tumbuh positifnya jenis pendapatan ini pada tahun 2014 dan 2015 hanya karena adanya rasionalisasi target PAD yang mulai dilakukan pada perencanaan APBD tahun 2014.

Kondisi ini menggambarkan masih kurangnya kreatifitas pemerintah Daerah untuk menggali potensi keuangan yang ada. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari sumber ini belum terimplementasi dengan baik. Belanja modal sebagai representatif perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat juga belum mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhannya yang tumbuh berfluktuatif dan tidak stabil.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel (lihat tabel 8), variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata 5.76%, standar deviasi 0.68 dimana nilai minimum variabel 5.07% (tahun 2009) dan maksimum 6.66% (tahun 2011). Untuk variabel Tingkat kemiskinan, nilai rata-ratanya adalah 10.60%, standar deviasi 0.56, dimana nilai minimum variabel adalah 9.85% (tahun 2014) dan maksimum adalah 11.60% (tahun 2010).

Variabel Tingkat pengangguran, nilai rata-ratanya adalah 6.72%, standar deviasi 0.84. Dimana nilai minimumnya adalah 5.84% (tahun 2016) dan maksimumnya adalah 8.45% (tahun 2009). Variabel Rasio kemandirian memiliki nilai rata-rata 157.06%, standar deviasi 53.30. Dimana nilai minimumnya 94.22% (tahun 2016) dan maksimumnya 260.46% (tahun 2011).



Gambar 2. Rasio pertumbuhan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016

Tabel 8. Perhitungan Statistik Deskriptif Data

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
		Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Perumbuhan ekonomi	8	5,07	6,66	5,7638	,24125	,68235
Tingkat kemiskinan	8	9,85	11,60	10,5975	,19854	,56155
Tingkat pengangguran	8	5,84	8,45	6,7200	,29703	,84012
Rasio kemandirian	8	94,22	260,46	157,0562	18,84189	53,29291
Rasio Efektifitas	8	74,04	105,63	95,4100	3,88124	10,97781
Rasio Efisiensi	8	79,25	93,31	88,3525	1,51601	4,28793

Variabel Rasio efektifitas memiliki nilai rata-rata 95.41%, standar deviasi 10.98. Dimana nilai minimumnya sebesar 74.04% (tahun 2013) dan maksimumnya 105.63% (tahun 2015). Sedangkan variabel Rasio efisiensi memiliki nilai rata-rata 88.35%, standar deviasi 4.28. Dimana nilai minimumnya adalah 93.31% (2012) dan maksimumnya adalah 79.25% (tahun 2013).

Dari perhitungan analisis regresi model pertama (tabel 9), diketahui bahwa seluruh variabel independen (rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi) tidak ada yang memiliki nilai signifikansi ($P.value$) ≤ 0.05 . Artinya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan 2016 berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi belum berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (H1, H2, dan H3 ditolak).

Dari perhitungan analisis regresi model kedua (tabel 10), diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi ($P.value$) sebesar 0.666 atau ≥ 0.05 , yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 belum berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran (H4 ditolak).

Dari perhitungan analisis regresi model ketiga (tabel 11), diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi ($P.value$) sebesar 0.777 atau ≥ 0.05 , yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 belum berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan (H5 ditolak).

Tabel 9. Hasil analisis Regresi model Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. (P.vaue)
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.304	6.510		.661	.545
R. Kemandirian	.009	.006	.722	1.627	.179
R. Efektifitas	-.029	.040	-.472	-.736	.502
R. Efisiensi	.032	.098	.200	.323	.763

a. Dependent Variable: Pertumbuhan ekonomi

Tabel 10. Hasil analisis Regresi model Model kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.012	2.866		2.796	.031
Pertumbuhan ekonomi	-.224	.494	-.182	-.454	.666

a. Dependent Variable: Tingkat pengangguran

Tabel 11. Hasil analisis Regresi model Model ketiga

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	10.028	1.934		5.184	.002
Pertumbuhan ekonomi	.099	.334	.120	.296	.777

a. Dependent Variable: Tingkat kemiskinan

Hasil pendeskripsian kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio-rasio keuangan serta pengaruhnya terhadap variabel ekonomi makro dalam bentuk pertumbuhan ekonomi sebelumnya, dapat menggambarkan bahwa sebenarnya kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara delapan tahun terakhir belum dapat mempengaruhi performa ekonomi regional Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi belum berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian (Astuti 2015); (Syamsudin et al. 2015), (Ani & Dwirandra 2014) dan (Suryaningsih et al. 2015) sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menjadi semakin menarik ketika ditemukan bahwa hasil penelitian ini juga menolak hipotesis yang dibangun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan terhadap variabel pengangguran dan kemiskinan. Dimana pada penelitian ini disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara belum berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran maupun variabel tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Terdapat dua hal yang dapat menjadi bahan diskusi pada penelitian ini. yaitu : *pertama*) Bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian (perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah pusat), Rasio efektifitas (yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah), dan Rasio efisiensi (tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan

anggaran belanja yang telah ditetapkan), bukan merupakan faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode tahun 2009 s/d 2016.

Hal ini dimungkinkan terjadi disebabkan prestasi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya tidak didukung dengan pengalokasian belanja yang menyentuh langsung aktifitas perekonomian atau tertahannya kinerja konsumsi dan investasi pemerintah daerah yang mengakibatkan tertahannya kinerja perekonomian dari sisi domestik. Adi (2006) menyatakan seharusnya dengan PAD yang tinggi otomatis segala kebutuhan Pemerintah Daerah akan tercukupi dan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Tidak teralokasinya pendapatan daerah terhadap belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif, sebagai penyebab tidak berpengaruh signifikannya kinerja keuangan berbasis pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada periode tahun 2009 s/d 2016, memang dapat menjadi sebuah alasan yang kuat bila melihat data alokasi belanja daerah Provinsi Sumatera Utara pada periode tersebut. Hal ini dibuktikan oleh data alokasi belanja daerah berdasarkan kelompok dan jenis belanja, terlihat bahwa sejak tahun 2009 s/d 2016 peruntukan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara masih sangat didominasi oleh belanja operasi. Sejak tahun 2009 s/d 2016 persentase peruntukan belanja operasi dari total nilai belanja rata-rata sebesar 81.25%, sedangkan untuk belanja modal rata-rata yang hanya sebesar 18.72%.

Hal *kedua*) adalah belum berpengaruh signifikannya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan pada periode tahun 2009 s/d 2016. Hasil analisis ini telah

menolak berbagai teori atau temuan penelitian sebelumnya mengenai hubungan atau pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap variabel ketenagakerjaan dan kemiskinan. Seharusnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menyebabkan peningkatan permintaan akan tenaga kerja dan peningkatan upah yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Pendapatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memperbaiki pendapatan publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk prasarana fisik dan sosial, sehingga membantu mengurangi kemiskinan.

Sukirno (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat serta siapa saja yang telah menikmati hasilnya. Sehingga, menurunnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Kuznets (2001) dalam Todaro (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan ini terjadi. Ani dan Dwirandra (2014) menyatakan kondisi ini terjadi disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang terjadi tidak mampu mendorong pengalokasian belanja modal yang digunakan untuk mengembangkan infrastruktur usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ramdhan et al (2017) menyatakan bahwa kondisi ini disebabkan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi tidak menentu, dimana hal ini menyebabkan pengurangan tingkat pengangguran menjadi tidak optimal. Pengurangan tingkat pengangguran yang tidak optimal tersebut pada akhirnya menyebabkan pengendalian tingkat kemiskinan juga tidak optimal.

KESIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Utara telah berkinerja baik selama periode tahun 2009 s/d 2016. Hal ini dibuktikan berdasarkan nilai rasio kemandirian

dan rasio efektifitas keuangan daerah telah berkriteria baik. Namun menjadi masalah ketika kinerja yang baik di bagian pendapatan tidak terdistribusi untuk belanja pada sektor-sektor yang produktif, sehingga nilai kemandirian yang tergolong tinggi tidak dapat mendorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil juga mengakibatkan variabel tersebut juga tidak dapat mempengaruhi secara langsung tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus melakukan analisis dan evaluasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah di setiap tahunnya dan bagaimana kinerja keuangan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian makro dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pengelolaan keuangan tersebut.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan kontrol terhadap stabilisasi pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan pertumbuhan positif (terus meningkatkan) realisasi Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, serta menekan pertumbuhan realisasi belanja operasi kearah negatif (menurunkan anggaran dan realisasi belanja operasi setiap tahunnya).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terpublikasinya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Priyo Hari. 2006. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang, 23-26 Agustus 2006.

Ani, N. L. N. P. and Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota , *E-Jurnal Akuntansi*

Universitas Udayana, volume 6 n, pp. 481-497.

Astuti, W. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011) , *jurnal EBBANK*, volume 6(No. 1), pp. 1-18.

Batafor, G. G. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*. Universitas Udayana Denpasar.

Budiarto, B. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah, in *Seminar Ekonomi Daerah*. Surabaya.

Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Julitawati, E., Darwanis and Jalaluddin .2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akutansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), pp. 15-29.

Machmud, M., Kawung, G. and Rompas, W. 2014. Analisis kinerja Keuangan daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, *Jurnal Berkala Ilmiah Effisiensi*, 14(2), pp. 1-13.

Mahmudi, 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Ramdhan Dahma Amar, Setyadi Djoko dan Wijaya Adi. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Di Kota Samarinda. *INOVASI* Volume 13 (1), 2017, 1-18

Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryani, Basri, H. and Faisal. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara, *Jurnal Bisnis dan ekonomi*.

Suryaningsih, N. N., Utama, M. S. and Yasa, I. N. M. 2015. Dampak Kinerja keuangan daerah terhadap Kesejahteraan masyarakat kabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, volume 4(8), pp. 537-554.

Syamsudin, Cahya, B. T. and Dewi, S. N. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan, *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, Volume 17(No. 1), pp. 15-27.

Todaro, Michael P, 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedua, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta: Erlangga